***ASEAN PRINCIPLE: DILEMMA AND NECESSITY***

Oleh:

**ARINDRA AHMAD FAUZAN**

Padjadjaran University

Email: arindra16002@mail.unpad.ac.id

***Abstract***

*The purpose of this study is to explain how ASEAN solved problems in stabilizing their territory. As we know the formation of ASEAN as a regional organization of Southeast Asia is to liberate countries in Southeast Asia from the influence of The Great Powers. This is in line with the realism that deeply bound within ASEAN. Ahead of the 15th anniversary of the formation of ASEAN, there was a major conflict between Vietnam and Cambodia, precisely in the 1970s. This is one of the catalysts that destabilize the ASEAN’s stances to avoid various types of multilateral relations. The method used in this research is qualitative with historical analysis from various literatures. After successfully resolving the conflict, in 1994 ASEAN established ARF as a workplace to discuss security in Asia, in order to facilitate such conflicts to occur again. ARF members are not only ASEAN countries but also superpowers. This is contrary to the foundation of ASEAN itself. In essence it shows that realism is willing to subdue with liberalism.*

***Keywords:*** *Realism, Security community, superpower, conflict, Vietnam, Cambodia, ASEAN*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana ASEAN memecahkan masalah dalam menstabilkan wilayah mereka. Seperti kita ketahui terbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara adalah untuk membebaskan negara-negara di Asia Tenggara dari pengaruh *The Great Powers*. Hal ini sejalan dengan realisme yang begitu dalam terikat di dalam fondasi ASEAN. Jelang 15 tahun terbentuknya ASEAN, terjadi sebuah konflik besar antara Vietnam dan Kamboja, tepatnya tahun 1970-an. Tampaknya konflik ini merupakan salah satu katalisator yang menggoyahkanpendirian ASEAN untuk menghindari berbagai jenis hubungan multilateral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis historis dari berbagai literatur. Setelah berhasil menyelesaikan konflik tersebut, pada tahun 1994 ASEAN membentuk ARF sebagai kerangka kerja untuk membahas keamanan di Asia, guna mencegah konflik seperti itu terjadi lagi. Anggota ARF bukan hanya negara ASEAN tapi juga negara adikuasa. Hal ini bertolak belakang dengan dasar pendirian ASEAN itu sendiri. Pada intinya hal ini menunjukkan bahwa realisme seakan takluk dengan liberalisme.

**Kata Kunci:** Realisme, komunitas keamanan, superpower, konflik, Vietnam, Kamboja, ASEAN

**PENDAHULUAN**

Terbentuknya ASEAN bukanlah tanpa alasan yang jelas, tentu ada perumusan dan perencanaan yang matang di dalamnya, dibutuhkan suatu kesamaan tujuan dari negara-negara yang terlibat dalam perumusannya. Lima negara, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yang pertama merumuskan terbentuknya sebuah organisasi regional di Asia Tenggara. Hasil rumusannya adalah terbentuknya ASEAN pada 6 Agustus 1967. Adapun kelima negara perumus tersebut memiliki kesamaan di dalam sejarah, yaitu sebagai ‘bekas’ kolonisasi bangsa barat. Mereka sepakat untuk mendasari pembentukkan ASEAN dengan menerapkan prinsip untuk menghindari berbagai upaya kerjasama multilateral. Pengalaman yang begitu pahit, membuat unsur realisme timbul begitu kental dalam tubuh ASEAN. Mereka berpikir bahwa *ASEAN only for ASEAN,* tidak boleh ada intervensi ataupun keterlibatan lainnya dari luar negara ASEAN terhadap urusan yang ada di ASEAN. Namun ternyata terlihat bahwa pendirian ASEAN tidak sekuat itu, ditambah konflik yang melanda di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1970-an antara Vietnam dan Kamboja yang melibatkan dua kekuatan komunis terbesar di dunia, PRC dan Uni Soviet. Seolah-olah dunia tidak adil dengan menguji ASEAN yang baru saja terbentuk genap10 tahun dengan konflik yang terbilang cukup besar. Konflik ini seperti sebuah katalis yang semakin mempercepat reaksi ASEAN untuk mengambil tindakan dengan melibatkan negara lain untuk menyelesaikannya, kekuatan ASEAN masih belum cukup kuat untuk bisa menyelesaikan konflik ini sendirian.Buktinya adalah terbentuknya *ASEAN Regional Forum* (ARF) pada tahun 1994 yang anggotanya tidak hanya ASEAN tetapi juga beberapa negara barat dan juga *superpower*.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif non-interaktif deskriptif dengan analisis historis. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi memalui berbagai macam literatur yang membahas dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan topik dalam penelitian ini. Analisis historis dilakukan ketika mencoba meneliti asal muasal kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian terulang atau terjadi sampai saat ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menghubungkan dinamika perjalanan ASEAN di masa lalu, dari mulai terbentuknya ASEAN, dinamikanya sampai menjadi seperti sekarang.

**ASEAN Sebagai Komunitas Keamanan: Norma dan Prinsip**

ASEAN dibentuk pada 6 Agustus 1967, dimana pelopor utamanya yaitu Malaysia di wakili oleh Tun Abdul Razak, Adam Malik (Indonesia)), S. Rajaratnam (Singapura), Narsisco Ramos (Filipina) dan Thanat Koman (Thailand). ASEAN sebagai salah satu yang grup yang mampu menyatukan perbedaan dari anggota-anggotanya. Mulai dari ukuran fisik, komposisi etnis dan demografi, social dan ragam kebudayaan, serta pengalaman terjajah dengan politiknya pasca-kolonial. Mereka semua merupakan “pendatang” dan memilki pengalaman yang cukup minim di dalam kerjasama multilateral. Maka dari itu terbentuknya ASEAN merupakan sebuah gerakkan yang mengguncang politik dunia, sebagai sekumpulan negara “baru” yang berusaha membentuk identitas di ranah internasional.

Melihat dari ragam kebudayaan dan politik yang berbeda-bedadan akibatnya sulit untuk menemukan dasar pembentukan rangka dari regionalism itu sendiri, karenanyadibentuklahprinsip-prinsip serta norma-norma yang diberlakukan bagi negara-negara ASEAN. Adapun setelah berbagai pertimbangan melalui berbagai interaksi, para pendiri akhirnya mengadopsi satu perangkat norma dan prinsip untuk diberlakukan pada hubungan intra-regional. Prinsip-prinsip yang berlaku di ASEAN ini meliputi pertimbangan legal-rasional dan social-kultural dari variasi yang beragam anggota ASEAN itu sendiri. Prinsip pertama, non interferensi dan prinsip tanpa kekerasan. Prinsip non-interferensi dan tanpa kekerasan ini sebetulnya merupakan prinsip yang lazim di dalam organisasi internasional di era yang modern ini, meskipun oleh ASEAN ditambahkan dengan unsur perjuangan anti-kolonial yang diambil dari organisasi regional *Third World* sebagai upaya untuk memperkenalkan diri di dalam berbagai urusan internasional.[[1]](#footnote-1)Prinsip yang kedua adalah menghindari Pakta militer hubungan multilateral, berawal dari rencana regionalis yang memuncak di Bandung, kita kenal dengan Konvensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konvensi ini membahas tentang keterikatan negara-negara Asia di dalam Pakta Militer seperti *Southeast Asia Treaty Organization (SEATO)* dan *Central Asia Treaty Organization (CENTO)* yang digagas oleh salah satu negara *superpower* saat itu, yaitu Amerika Serikat untuk ikut campur di dalam urusan di kawasan Asia Tenggara. Konvensi Asia Afrika merupakan awal dari munculnya gerakkan non-blok (*non-aligned movement)* yang sebagian anggotanya saat itu adalah Indonesia dan Malaysia.[[2]](#footnote-2) Penolakan terhadap pakta militer ini membuat ASEAN enggan untuk melakukan kerjasama regional di bidang pertahanan, terutama bagi yang dianggap sebagai sekutu barat. ASEAN tidak ingin menjadi SEATO.

Adopsi norma dan prinsip ini bukan sebuah penemuan konseptual, tetapi hasil proses sosialisasi untuk mendefinisikan sendiri politik regional dan kemanan regional, hal ini melibatkan adaptasi untuk menentukan cakupa dari norma dan prinsip ini. Di sini peranan sosio-kultural sangatlah penting di dalam pelebaran interaksi antar negara ASEAN yang melibatkan berbagai posisi negara yang berbeda.

Pembentukkan ASEAN berdasarkan paparan di atas terlihat sekali mereka memandang dunia dengan pandangan realism. Realisme adalah sebuah paham atau ideologi di dalam Studi Hubungan Internasional (SHI) yang bertindak berdasarkan tiga prinsip utama, *self-help, survival* dan *statism*. Adapun jika dilhat dari sejarahnya adalah paham ini secara tidak langsung dicetuskan oleh Thomas Hobbes pada abad ke-16, pada saat itu memang belum terdapat Studi Hubungan Internasional. Studi Hubungan Internasional sendiri baru muncul pada abad ke-20, tepatnya di Universitas Wales (sekarang Universitas Aberystwyth). Kemudian munculnya istilah realisme sendiri baru ada pada abad ke-20, sejalan dengan munculnya Studi Hubungan Internasional (SHI) oleh Hans Morgenthau.

Sejarah yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN mempunyai kesamaan, Sebagian besar anggotanya merupakan negara bekas jajahan FirstWorldatau kita kenal dengan *Western*. Selama ini seperti memang kita ketahui bahwa kolonisasi yang dilakukan oleh bangsa barat sangatlah meluas hingga mencakup wilayah Asia Tenggara.

Kesamaan rasa yang dimiliki oleh anggotanya membuat mereka memutuskan untuk bersatu di dalam sebuah organisasi yang menumbuhkan kepercayaan diri mereka di mata dunia internasional. Pertama, mereka menolak adanya kerjasama yang berkaitan dengan pakta militer secara multilateral, terutama yang memiliki keterkaitan dengan *The Great Powers*, disini terlihat bahwa unsur *self-help* dan juga unsur *survival* dari realism terpampang jelas. Unsur *Self-help*dari realisme ditunjukkan olehmereka dengan menganggap bahwa tidak ada yang bisa membantu mereka selain diri mereka sendiri,*ASEAN isonly for ASEAN.* Dasar pembentukkan ASEAN seolah mengatakan bahwa mereka tidak mau lagi terjebak sebagai korban dari kontrol barat, terjebak di dalam kesadaran palsu (*false consciousness)* seperti yang terjadi di SEATO. *Survival,* unsur ini melihat ASEAN terbentuk sebagai upaya “pertahanan”, dengan bersatunya seluruh negara ASEAN, tentunya ada misi di antara mereka untuk saling menjaga satu sama lain dari intervensi negara-negara yang tergolong *The Great powers*yang mayoritas adalah bangsa barat*.* Kedua, di dalam realisme juga terdapat unsur *relative gains* dan *absolute gains.* ASEAN juga terlihat mempertimbangkan *relative gains* tanpa melihat*absolute gains*.[[3]](#footnote-3)*Relative gains*dapat diumpamakan seperti misal ketika ASEAN ingin melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat, namun mereka (ASEAN) mengkhawatirkan bahwa kerjasama ini justru tidak memiliki keuntungan yang signifikan bagi mereka, dan justru membuat mereka terjatuh dalam jebakan strategi milik Amerika Serikat yang membuat mereka merugi tanpa disadari. Sedangkan*Absolute gain* adalah mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk melakukan kerjasama demi mendapatkan keuntungan yang sama antar kedua subjek kerjasama. ASEAN telah belajar dari kejadian di masa lalu yang dialami oleh anggota-anggotanya yang pernah jatuh ke dalam jebakan yang sama. ASEAN memiliki ciri khas sosio-kultural yang menjadikan ASEAN dilihat sebagai organisasi yang unik, mereka mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai warisan budaya Asia Tenggara. Itulah norma-norma yang membantu ASEAN untuk mencapai kesepakatan mengenai makna dan cakupan prinsip-prinsip legal-rasional.

**Kamboja vs Vietnam dan RRC**

ASEAN yang baru saja berdiri selama beberapa tahun berhasil dikejutkan oleh salah satu konflik yang berkepanjangan antar sesama negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam dan Kamboja. ASEAN memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas di Asia Tenggara, untuk itu meskipun Vietnam dan Kamboja belum menjadi anggota ASEAN, namun ASEAN seolah memiliki naluri untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik ini.

Konflik ini terjadi pada tahun 1970an, tepatnya pada 1977-1979 terjadi sebuah perang di antara Vietnam dan Kamboja. Mereka berdua merupakan negara komunis yang masih tersisa di Asia Tenggara, sejatinya hubungan antara negara komunis biasanya memilki kedekatan yang luar biasa, namun berbeda dengan hal ini. Tampaknya pada peristiwa ini, norma dan prinsip ASEAN sedang diuji, mereka ditantang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Vietnam dan Kamboja, keduanya masing-masing memiliki sekutu komunis yang kuat, Vietnam lebih cenderung pro terhadap Uni Soviet, sedangkan Kamboja lebih pro terhadap Cina. Uni Soviet dan Cina sendiri yang sebelumnya merupakan kawan dekat, berubah menjadi renggang setelah Joseph Stalin meninggal, CIna beranggapan bahwa Nikita Khruschev selaku penerus Stalin terlalu lembek dan mendukung akan kapitalisme barat.

Di Vietnam, pada tahun 1957 terjadi peperangan nasional, antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kedua kubu tersebut memiliki paham yang saling bertentangan, Vietnam Selatan yang anti terhadap komunis dan Vietnam Utara yang *pro* terhadap komunis. Di peperangan ini, Cina-Soviet kembali memperkuat hubungan mereka dengan sama-sama mendukung Vietnam Utara. Hasilnya, pada tahun 1975 Vietnam Utara memenangkan pertempuran, dan sampai saat ini negara Vietnam merupakan salah satu negara komunis yang bertahan di ASEAN, bersama dengan Laos. Kemudian Mei 1975 terjadi sebuah konflik yang memicu peperangan ini terjadi, konflik ini terjadi di Pulau Phu Quoc[[4]](#footnote-4). Awalnya ketika kapal patrol Kamboja melihat bahwa kapal patrol Vietnam melewati batas negara Kamboja, sehingga terjadilah penembakan. Vietnam beralasan bahwa hal tersebut dilakukan karena wilayah patrol mereka terlalu sempit, dan berencana memperluas wilayah patroli. Garis wilayah Vietnam-Kamboja sebenarnya sudah ditentukan berdasarkan *Brevia Line* pada tahun 1954.[[5]](#footnote-5)Konflik di Pulau Phu Quoc berlanjut ke pengejaran kapal militer Kamboja oleh kapal Vietnam yang memasuki wilayah Pulau Thu Chau, yang merupakan teritori Vietnam. Satu bulan kemudian, Vietnam menyerang angkatan laut Kamboja di Poulo Wai pada 11 Juni 1975. Diduga bahwa di Poulo Wai terdapat sumur minyak yang menggiurkan bagi kedua negara.

Saat penyerangan itu terjadi, Pol Pot, pemimpin Khmer merah yang berkuasa di Kamboja saat itu mencoba menyelesaikan masalah Pulau Phu Quoc secara kekeluargaan, Pol Pot mengadakan pertemuan dengan Nguyen Van Linh (petinggi Vietnam saat itu). Hasilnya adalah Pol Pot mengakui kedaulatan Vietnam atas Pulau Phu Quoc. Pada tahun 1976, kedua negara kembali bertemu untuk membahas *Brevie Line* yang menjadi acuan teritori mereka di wilayah perairan.[[6]](#footnote-6)Pertemuan itu mengalami kebuntuan dan tidak menemukan hasil.

Hubungan mereka berjalan baik sampai akhirnya Khmer Merah mendengar rencana Vietnam yang ingin membentuk sebuah Federasi di wilayah Indocina. Khmer Merah menganggap bahwa hal itu akan menimbulkan hegemoni bagi Vietnam. Khmer Merah tidak ingin ada interferensi dari Vietnam seperti yang terjadi di Laos. Konflik yang terjadi di Laos membuat mereka harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menerima bantuan Vietnam, sekitar 30 ribu pasukan Vietnam ada di Laos. [[7]](#footnote-7)

**Komunis vs Komunis**

Pada tahun 1976, Viernam menyerang timur Kamboja, hal tersebut membuat hubungan mereka semakin renggang. Pol Pot mencoba merebut kembali wilayah Kampuchea Krom yang diambil alih oleh Vietnam. RRC yang melihat bahwa Vietnam didukung oleh Uni Soviet, membuatnya beralih memberi dukungan terhadap Kamboja. Pada tahun 1977, Khmer Merah melakukan penyerangan ke provinsi Kien Giang di Hatien dan Gianf di Tinh Bien, 222 orang Vietnam tewas, Desember 1977 Vietnam membalas dengan serbuan besar, sekitar 60 ribu pasukan disiapkan.[[8]](#footnote-8) Pertahanan Kamboja semakin lemah mengingat pasukan mereka yang tidak sebanding dengan pasukan Vietnam, 1979 akhirnya Phnom Penh jatuh ke tangan Vietnam dan mengakhiri era Khmer Merah.

**Pengaruh Superpower**

Konflik ini sepertinya dijadikan sebagai sasaran bagi negara-negara *superpower* utnuk memperluas pengaruhnya, Cina, Ameriak Serikat dan Uni Soviet. Di dalam konflik ini yang paling berpengaruh adalah Cina dan Uni Soviet, melihat bahwa mereka mendukung dua kubu yang berbeda. Cina yang merupakan pendukung Kamboja mencoba merangkul mitranya untuk menerapkan hegemoninya di Asia Tenggara. Cina memberikan dukungan terhadap *Democratic Kampuchea (DK)* yang dipimpin oleh Pol Pot, bahkan mereka memberikan jalan bagi pejabat DK untuk membentuk pemerintahannya selama diasingkan di CIna. [[9]](#footnote-9)

Tahun 1979, setelah peperangan usai dan Vietnam berhasi mengakuisisi Kamboja, mereka membentuk pemerintahan baru di bawah Vietnam dengan nama *People’s Republic og Kampuchea (PRK).* Dipimpin oleh Heng Samrin sebagai presiden dan Hun Sen sebagai Perdana Menteri. Namun, nyatanya dukungan tidak bisa didapatkan dengan mudah setelah melihat apa yang Vietnam lakukan terhadap Kamboja. Mayoritas negara-negara lain tidak mengakui pemerintah Heng Samrin di Kamboja selain Uni Soviet dan Laos. ASEAN dan Cina sangat menentang pemerintahan tersebut. Hal ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Cina untuk memperluas pengaruhnya di ASEAN, melihat bahwa mereka berdua sangat menentang tentang apa yang terjadi di Vietnam.

**Internasionalisasi Konflik Kamboja vs Vietnam**

ASEAN telah menyadari bahwa implikasi dari pendudukan Vietnam ke Kamboja telah merusak visinya sebagai organisasi Asia Tenggara yang sangat menentang adanya interferensi dari negara lain, termasuk antar negara Asia Tenggara. Menilik bahwa saat itu Vietnam dan Kamboja belum menjadi anggota ASEAN. Kendati demikian, ASEAN tetap menjaga norma dan prinsipnya di dalam menyelesaikan konflik. Mereka menganggap bahwa ASEAN tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur di dalam konflik tersebut, terlebih saat itu Vietnam dan Kamboja memang belum menjadi anggota ASEAN. Untuk itu disini kembali terlihat peranan Cina yang cukup signifikan, ASEAN mencoba menyelesaikan konflik ini dengan memanfaatkan pengaruh dari anggota komunitas internasional, terlebih dengan CIna yang memiliki pengaruh di dalam konflik ini. Pada tahun 1981, PBB menggelar ICK (*International Conference on Kampuchea).*

ASEAN sangat berpegang pada prinsip dan norma yang mereka anut, yaitu tidak boleh adanya intervensi di antara negara-negara Asia Tenggara, mereka sangat mengutuk perbuatan Filipina atas invasinya ke Kamboja, ASEAN menganggap bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ideology yang dianut oleh ASEAN. Kamboja memiliki haknya sendiri untuk mendapatkan kebebasan dari campur tangan pihak lain. Sementara itu hasil dari ICK sendiri tidak bisa diandalkan di dalam mengatasi konflik ini.

**Peranan ASEAN dan Negara-negara Anggotanya**

Penyelesaian konflik Kamboja dan Vietnam ini pertama-tama lewat tahap regional. ASEAN menempatkan dasar pemikirannya meliputi dua hal, dinamika ekonomi, social serta politik internal (di ASEAN), dan tingkat ancaman eksternal dari ranah internasional yang kemungkinan bisa mempengaruhi terhadap persepsi ASEAN di dalam penyelesaian masalah Kamboja-Vietnam.

Mengingat bahwa ASEAN baru saja berdiri pada tahun 1967, sedangkan konflik Kamboja-Vietnam ini terjadi pada 1977, hanya 10 tahun dari berdirinya ASEAN. Mereka menyadari bahwa dengan waktu berdiri yang relative masih sangat muda, maka dinamika di berbagai aspek yang terjadi di internal ASEAN itu sendiri. Secara sistem, ASEAN masih sangat lemah sehingga konflik apapun yang terjadi pada waktu tersebut sangat memengaruhi stabilitas Asia Tenggara itu sendiri.

ASEAN sadar bahwa sebagai organisasi yang baru saja terbentuk, tentunya masih terdapat berbagai hambatan, seperti sikap egaliter dari negara-negara ASEAN itu sendiri, mereka masih cenderung untuk memiliki kepentingan dan prioritasnya masing-masing. Konflik ini sebagai sebuah ujian untuk menunjukkan kekuatan stabilitas dari ASEAN.

Pada masa-msaa ini, negara-negara Asia Tenggara mengalami teori domino yang mengatakan apabila suatu negara jatuh ke tangan komunis, maka negara-negara lainnya akan ikut berjatuhan ke tangan komunis secara perlahan.[[10]](#footnote-10) Asia Tenggara menunjukkan sikap berhati-hati terhadap meningkatnya ideology komunisme di sana sambil menekankan posisi ASEAN sebagai sebuah organisasi yang netral dan tidak konfrontasional.

ASEAN melakukan tahap awal menyelesaikan konflik ini lewat dialog selama periode 1979 sampai awal tahun 1980-an. Sebelum munculnya konflik Kamboja-Vietnam, para Menteri Luar Negeri ASEAn mencoba membahas konflik internal yang mulai menjalar di berbagai aspek kehidupan di Kamboja, usai runtuhnya rezim pemerintahan Pangeran Sihanouk (sebelum Pol Pot). Negara-negara mengharapkan setiap pihak yang terkait di dalam konflik internal Kamboja ini dapat bekerjasama, sebagai upaya menunjukkan hormat kepada Piagam PBB dan Konferensi Jenewa pada tahun 1954 mengenai kawasan Indochina demi menciptakan suasana yang kondusif, stabil dan aman di kawasan Indochina, termasuk Kamboja. [[11]](#footnote-11)

Pada tahun 1982, terbentuk sebuah koalisi pemerintahan antara Partai Funcinpec, Partai Demokrasi Kampuchea (Khemr merah) dan Partai Nasional Liberal Khmer (KPNLF) di Kamboja yang bernama CGDK. Secara *de facto* dan *de jure* PBB mengakui adanya pemerintahan koalisi tersebut, sehingga Kamboja memiliki hak legitimasi di dalam Majelis umum PBB. Pada tanggal 21 September 1983 para Menteri Luar Negeri ASEAN mengeluarkan *joint appeal* terhadap upaya rekonsisliasi di (Luhulima, 1986)(Sutopo, 1981)wilayah Indochina dengan meminta Vietnam untuk menarik pasukan militernya keluar Kamboja dengan batas waktu.

Kemudian, pada komunike pertemuan tingkat menteri ASEAN yang ke-17 pada 9-10 Juli 1984 di Jakarta, para Menlu ASEAN kembali menegaskan posisi mereka dalam penyelesaian politik serta menguatkan keyakinan akan kemerdekaan Kamboja pada 21 September 1983, sebagai upaya konkrit untuk penyelesaian masalah yang sudah lama terjadi di Kamboja. Pertemuan selanjutnya diadakan pada November 1983 di Jakarta, Desember 1983 di Kuala Lumpur dan Januari 1984 kembali di Jakarta.

Terdapat lagi beberapa rencana lain yang dipakai oleh ASEAN, di antaranya memanggil faksi-faksi yang berkaitan dengan konflik terkait di Kamboja untuk hadir pada peringatan Konferensi Asia Afrika ke-30, April 1985. Indoensia dan Malaysia mengusulkan *Proximity talks.* Upaya konsolidasi antar pihak Vietnam dengan pihak Kamboja untuk bernegosiasi. Hal ini berkaitan dengan ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality)* yang dicanangkan oleh ASEAN pada tahun 1971 untuk menjaga kemanan, kedaulatan dan perdamaian negara-negara Asia Tenggara. Meskipun ICK dinilai tidak terlalu berdapak signifikan, nyatanya konferensi tersebut mampu membangun fondasi prakarsa untuk sebagai katalis dalam mengambil langkah untuk memelihara perdamaian dunia.

Sebetulnya gagasan akan *proximity talks* yang dicetuskan oleh Malaysia dan Indonesia kurang mendapatkan dukungan dari negara-negara ASEAN lainnya dan juga Pemerintahan koalisi Kamboja (CGDK) dan Pemerintahan Heng Samrin di Phnom Penh. September 1985, Sihanouk mengusulkan tentang *Cocktail Party Party*, dan iini mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara bersangkutan. November 1985, Indonesia mengajukkan diri menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Cocktail Party* ini. Usahanya baru terealisasikan setelah tiga tahun menunggu. Bogor, Indonesia menjadi saksi terselenggaranya pertemuan ini, tepatnya pada 25-28 Juli 1988, di dalam peretemuan ini Vietnam diminta untuk menarik pasukannya dari Kamboja sebagai itikad baik. Pertemuan pertama dinamakan sebagai *Jakarta Informanl Meeting* Iini dieslesaikan dengan pembentukan kelompok kerja masing-masing pihak terkait guna dibahas pada pertemuan berikutnya.

Pertemuan kedua atau JIM II dilaksanakan pada 16-18 februari 1989, hasil konkritnya adalah penentuan tanggal maksimal bagi Vietnam untuk menarik mundur pasukannay dari Kamboja, yaitu pada tangal 30 September 1989. Kemudian juga diimbau untuk menghentikan keterlibatan pihak-pihak di luar ASEAN mengeai dukungan militer di Kamboja. Untuk itu dibentuklah sebuah mekanisme pengawasan dunia internasional guna mengawasi dan mencegaj munculnya kembali kebijakan rezim kejam yang menyengsarakan Kamboja. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan kesepakatan setiap pihak untuk berjalannya program ini, serta upaya pengumpulan dana sebagai wujud pelakasaan program ini di Kamboja. JIM I dan JIM II akhirnya diformulasikan di dalam pertemuan ASEAN di Brunei pada 3-4 Juli 1989 guna menyelesaikan konflik di Kamboja.

**Berdirinya *ASEAN Regional Forum (ARF)***

Di awal terbentuknya ASEAN terllihat jelas bahwa norma dan prinsip mereka adalah dengan menghindar dan berencana melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruh negara-negara *superpower* seperti Ameriak Serikat. China, Uni Soviet. Mayoritas dari negara anggota ASEAN adalah bekas kolonisasi yang dilakukan oleh bangsa barat. Tidak heran melihat ASEAN terbentuk atas dasar “pembebasan diri” dari pengaruh bangsa barat. Terpampang jelas pada paragraf pertama pembukaan tulisan ini. Unsur realisme sangat kental di dalam perumusan prinsip berdirinya ASEAN, konsep *self-help* dimana mereka menganggap tidak ada yang bsia menolong dirinya selain dirinya sendiri, *survive,* bagaimana caranya bertahan hidup dari gempuran-gempuran negara-negara *superpower,* membentuk sebuah aliansilah jawabannya. Namun ternyata, pada kenyataannya ASEAN masih tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Dinamika politik yang terjadi di kawasan ASEAN membuat mereka sendiri bersusah payah mencari jalan keluar. Terlebih lagi konflik yang terjadi memiliki keterkaitan dengan dua negara komunis terbesar di dunia pada saat itu, Uni Soviet dan PRC. Konflik yang berlarut-larut antar Vietnam dan Kamboja membuat ASEAN tidak lagi mampu menyelesaikan masalah itu sendiri. Di sinilah terlihat celah yang begitu besar bagi negara-negara *superpower* untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah ini, sampai PBB pun ikut serta. Akhirnya setelah proses yang begitu panjang, masalah yang berawal pada tahun 1977 selesai pada tahun 1989. ASEAN seakan menunjukkan kerentanannya sebagai organisasi yang baru berdiri pada tahun 1967 ini. Pendiriannya yang begitu kuat di awal perlahan-lahan melembek dan membuka diri. Unsur realism sedikti demi sedikit memudar dari jati diri ASEAN.

Tahun 1994, meurpakan akhir dari keutushan realism yang dimiliki oleh ASEAN. Terbentuknay ASEAN Regional Forum yang turut mengikutsertakan para *superpower* dunia seperti Cina, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia di dalam diskusi keamanan. Sebuah sarana yang sangat lega bagi para *superpower* untuk menggali kelemahan yang dimiliki oleh ASEAN. Alasannya adalah demi menjaga kemanan di wilayah Asia Pasifik, sebuah alasan yang sangat klise. ASEAN seolah menjadi lumbung perebutan kekuasaan oleh negara-negara *superpower*. Sangat bertolak belakang dengan prinsip yang ASEAN buat sendiri.

**PENUTUP**

Peneliti berhasil mencapai tujuan dari penelitian ini, yaitu menjelaskan bagaimana ASEAN menyelesaikan konflik yang pernah terjadi di wilayahnya, terutama konflik besar antara Kamboja dan Vietnam yang juga melibatkan dua kekuatan besar komunis, PRC dan Rusia. ASEAN yang pada awalnya berprinsip dan berpegang teguh kepada realisme perlahan menurun. Usia ASEAN yang masih tergolong muda pada waktu itu, belum mencapai 15 tahun tentunya masih harus menghadapi dinamika internal yang seharusnya dikokohkan terlebih dulu. Belum selesai menyelesaikan dinamika internal yang ada di dalam organisasi, ASEAN sudah harus menghadapisuatu konflik yang cukup besar, antara Kamboja dan Vietnam. Di dalam konflik tersebut terlihat bahwa ASEAN tidak mampu menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN selalu menemukan jalan buntu, hingga pada akhirnya ASEAN harus mempertaruhkan prinsip mereka guna mencapai perdamaian di Asia Tenggara, yaitu dengan membiarkan pihak lain untuk ikut campur di dalam menyelesaikan konflik ini. Bahkan ASEAN merumuskan *ASEAN Regional Forum (ARF) ASEAN Regional Forum (ARF)* yang anggotanya tidak hanya berasal dari Asia Tenggara, namun juga negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan PRC. Hal ini menunjukkan ketidak konsistensian ASEAN di dalam menerapkan realisme sebagai fondasi ASEAN, sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa realisme benar-benar sudah tidak lagi relevan dan liberalisme-lah obatnya, dimana kerjasama adalah hal yang utama. Hal ini bisa dijadikan sebagai fakta untuk menunjukkan kegagalan realisme di dalam mencapai perdamaian. Sebuah dilema bagi ASEAN, mereka harus memilih antara mempertahankan prinsip atau mencapai suatu perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Baylis, J., Smith, S., & Owen, P. (2008). *John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens-The Globalization of World Politics.* Oxford Press.

Fawcett, L., & Savigh, Y. (1999). *The Third World Beyond the Cold War.* Oxford: Oxford University Press.

Haacke, J. (2002). *Diplomatic and Security Culture.* London: Routledge.

Heder, S. P. (1979). The Kampuchean-Vietnamese Conflict. *Souteast Asian Affairs*.

Leighton, M. K. (1979). Perspective on the Vietnam-Cambodia Border Conflict. *Asian Survey XIX*.

Luhulima, C. P. (1986). The Kampuchean Issue . *Indonesian Quarterly*.

Ross, R. R. (1990). *Cambodia: A Country Study.* Washington: Library Congress Federal research division.

Sutopo, A. R. (1981). *Masalah Komunisme di Negara-negara ASia tenggara: Startegi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan ASia Pasifik.* Jakarta : CSIS.

Thayer, C. (1979). The Two Lines Conflict in Khmer Revolution, in Vietnam Kampuchea-China Conflicts: Motivations, Banckground, Significance by Malcom Salom. *Research School of Pacific Studies Australian national university*.

1. Jurgen Haacke, *ASEAN’s Diplomatic and Security Culture (*London: Routledge, 2002) [↑](#footnote-ref-1)
2. Louise Fawcett and Yezit Sayigh, *The Third World Beyond the Cold War* (Oxford: Oxford University Press, 1999) [↑](#footnote-ref-2)
3. John Baylis, Patricia Owens and Steve Smiths, *The Globalization of World Politics* (Oxford, Oxford University Press, 2008) [↑](#footnote-ref-3)
4. Marian Kirsch Leighton, *Perspective on the Vietnam-Cambodia Border Conflict, Asian Survey XIX, No. 4 April 1979* [↑](#footnote-ref-4)
5. Stephen P. Heder, *The Kampuchean-Vietnamese Conflict, Southeast Asian Affairs*. 1979 [↑](#footnote-ref-5)
6. Russel R. Ross, *Cambodia: A Country Study.* (Washington, Library Congress Federal Research Division, 1990) [↑](#footnote-ref-6)
7. Carlyle Thayer, *The Two-Lines Conflict in the Khmer Revolustion,* in Vietnam Kampuchea-China Conflicts: motivations, Backgroung, Significance by Malcom Salom. Research School of Pacific Studies Australian national University, March 1979 [↑](#footnote-ref-7)
8. Stephen P. Heder, *loc cit.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Tim Peneliti FISIP Univ. Airlangga. [↑](#footnote-ref-9)
10. A. R. Sutopo, *Masalah Komunisme di Negara-negara Asia Tenggara. Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.* Jakarta. CSIS. 1981 [↑](#footnote-ref-10)
11. C. P. F Luhulima, *The Kampuchean Issue Revisited. Indonesian Quarterly Vol. XIV No. 4. 1986* [↑](#footnote-ref-11)